



Bali Dapat Label Terbaik Nasional

★ Berhasil Respons 80 Persen Rekomendasi dari BPK

Gubernur
Pastika
(kanan)
ngobrol
bersama
Ketua BPK
RI, Harry
Ashar
Azis, di
Kantor BPK
Perwakilan
Bali, Jumat
(24/4).



DENPASAR, NusaBali

Pemprov Bali baru tindaklanjuti 80 persen dari 1.026 item rekomendasi BPK terkait laporan kinerja keuangan tahun 2013. Sedangkan 20 persen rekomendasi lainnya belum ditindaklanjuti tuntas. Namun, secara nasional, Bali mendapat predikat terbaik dalam mere-

spons rekomendasi BPK. Bali berada di atas rata-rata nasional yang responsnya hanya 50 persen.

Paparan ini disampaikan Ketua BPK RI, Harry Ashar Azis, saat rapat 'Koordinasi Optimalisasi Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK' di Gedung BPK RI Perwakilan Bali,

Jalan DI Pandjaitan Niti Mandala Denpasar, Jumat (24/4). Dalam acara tersebut, Gubernur Bali Made Mangku Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta, para Bupati/Walikota se-Bali, dan Ketua BPK Perwakilan Bali Arman Syifa.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 1



Sambungan

Bali Dapat Label Terbaik Nasional

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Menurut Harry Azhar Azis, Pemprov Bali menyisakan beberapa hal terkait rekomendasi BPK. Masalah aset---yang nyaris tiap tahun jadi temuan---kini masih dalam proses, sehingga masuk ring 20 persen yang belum ditindaklanjuti Pemprov Bali. "Masalah aset ini perlu ditindaklanjuti. Ada juga beberapa masalah lainnya, bansos dan hibah," ujar Harry Azis.

Ditegaskan Harry Azis, pihaknya menargetkan daerah menindaklanjuti 10 persen dari rekomendasi BPK, sehingga bisa memperoleh opini tertinggi atas laporan keuangan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat ini, dari 538 daerah di Indonesia, hanya 156 yang memperoleh predikat WTP, termasuk Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar.

"Saat ini, kabupaten/kota di Bali rata-rata di atas 80 persen tindaklanjuti rekomendasi BPK. Bahkan, Kabupaten Tabanan memberikan respons tertinggi yakni 90,76 persen," ujar mantan politisi Golkar ini. Respons cepat Pemkab Tabanan ini mendapat apresiasi khusus. Pasalnya, Pemkab Tabanan sebelumnya sempat mendapat rapor merah dari BPK dengan opini Disclaimer atas

audit laporan keuangan tahun anggaran 2012. Setahun berikutnya, Pemkab tabanan naik kelas dapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Harry Azis menyebutkan, keberhasilan Bali dan kabupaten/kota di Pulau Dewata ini menjadi indikator tingkat kejujuran orang Bali. Dan, ini dapat menjadi rujukan bagi daerah lain. Akuntabilitas pengelolaan keuangan, kata dia, menjadi prasyarat penting dalam perkembangan dan kemajuan sebuah negara.

Sedangkan Anggota III BPK, Eddy Mulyadi, menyatakan ada pola koordinasi antara BPK dengan lembaga terkait dalam pemeriksaan. Menurut Mulyadi, sekarang ada opini bahwa setiap temuan BPK adalah kerugian negara. Padahal, tidak seluruhnya terjadi kerugian negara. Bisa saja itu temuan administratif.

Persoalannya selama ini, ketika penyampaian hasil pemeriksaan belum final, malah sudah muncul di media. "Seharusnya, kalau sudah final, barulah muncul di media. Kerugian negara dan kerugian keuangan negara itu berbeda. Kerugian negara itu sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ada waktu untuk penyelesaiannya," ujar

Eddy Mulyadi.

"Di sini peran auditor untuk lebih berhati-hati. Data tidak boleh diumbar ke luar (termasuk ke media). Kalau terus-terusan lembaga yang bertugas mengelola anggaran berhadapan dengan persoalan semacam ini, mereka bisa takut bekerja. Belum apa-apa, sudah lanjut ke polisi. Saya sudah bicara soal ini dengan Kabar-reskrim Mabes Polri, supaya tidak dengan gampangnya memvonis suatu temuan itu adalah pidana," tegas Eddy Mulyadi.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengakui masalah aset memang menjadi persoalan dan terus-terusan jadi rekomendasi BPK untuk segera ditindaklanjuti. Pemprov Bali kini sedang melaksanakan proses tindak-lanjut terkait masalah aset tersebut.

"Sekarang masih terus kita proses sertifikasi aset-aset yang ada. Kita berkomitmen untuk menindaklanjutinya secara optimal," papar Gubernur Pastika seraya menyebut ada 1.026 item rekomendasi BPK dan semuanya sudah ditindaklanjuti. Hanya masalah sertifikasi aset yang masih proses jadi kendala.

Pemprov Bali sendiri sebelumnya sempat 4 tahun secara berturut-turut hanya meraih opini

WDP dari BPK atas audit laporan keuangannya, yakni tahun anggaran 2009, 2010, 2011, dan 2012. Label WDP ini terpaku, salah satunya, karena masalah aset yang selalu jadi temuan.

Setelah empat tahun secara beruntun berlabel WDP, Pemprov Bali di bawah Gubernur Pastika kemudian melakukan penertiban, pendataan, dan penataan aset. Pemprov Bali pun pada akhirnya raih opini tertinggi WTP atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2013. Opini tertinggi WTP itu diserahkan langsung Ketua BPK (kala itu) Dr H Rizal dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, 6 Mei 2014 lalu.

Selain Pemprov Bali yang dalam status 'merebut' opini WTP, Pemkot Denpasar juga berhasil mempertahankan opini WTP atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2013. Setahun sebelumnya, Pemkot Denpasar juga meraih predikat WTP atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2012. Sayangnya, Pemkab Badung yang sebelumnya juga dapat opini WTP atas audit keuangan tahun anggaran 2012, gagal mempertahankan prestasinya di tahun anggaran 2013. Badung justru jatuh dua tingkat. **nat**



BPK Wacanakan Pengukuran Korelasi Rupiah-Kemakmuran

DENPASAR, NusaBali

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Harry Azhar Azis mengemukakan wacana untuk mengukur perbandingan nilai rupiah yang dikeluarkan pemerintah dengan tingkat kemakmuran rakyat.

"Kami tidak ingin hanya berkatut pada penilaian administrasi, tetapi juga mengukur sejauh mana uang negara bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat," kata Azis pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Denpasar, Jumat (24/4), dilansir Antara.

Menurut dia, yang menjadi indikatornya antara lain, tingkat pengangguran, kemiskinan, IPM (Indek Pembangunan Manusia) dan sebagainya. Bahkan, BPK menggagas pemberian award atau penghargaan bagi daerah yang berhasil meraih nilai baik. Selain itu, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberi intensif bagi peraih award.

Di sisi lain, Azis mengemukakan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi prasyarat penting dalam perkembangan dan kemajuan sebuah negara.

Hal tersebut, lanjut dia, merupakan amanat Undang-Undang Dasar. "UU mengamanatkan, keuangan negara harus dikelola secara transparan dan bertang-



gung jawab agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Dia berharap agar hal tersebut hendaknya menjadi bahan renungan seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengemban amanat sebaik-baiknya.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang didampingi Wagub Ketut Sudikerta menyambut positif penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut. "Kegiatan ini kami harapkan dapat menjadi wahana bagi pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, baik yang bersifat administratif maupun menyangkut adanya kerugian negara dan daerah," kata Pastika.

Pemprov Bali, tambah dia, berkomitmen bekerja keras dalam penyelesaian tindak lan-

jut hasil pemeriksaan BPK RI. Sesuai hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan per Desember 2014, BPK RI Perwakilan Bali mencatat jumlah temuan akumulatif dari tahun 2005-2014 sebanyak 427 dengan 1.026 rekomendasi.

"Secara umum rekomendasi BPK itu sudah mendapat penanganan tindak lanjut dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Bali dan lembaga lainnya," ujarnya.

Namun, Pastika mengakui masih ada sejumlah rekomendasi yang statusnya belum tuntas karena penyelesaiannya memang membutuhkan waktu secara bertahap, misalnya proses pensertifikatan tanah. Di samping itu, terdapat juga beberapa rekomendasi yang proses penyelesaiannya mengalami kebuntuan. **ant**



Dugaan Korupsi Pavingisasi Gajah Mada Masuk Tahap P-19, Penyidik Bidik Tersangka dari Pemkot

DENPASAR, NusaBali

Perkara dugaan korupsi pavingisasi di Jalan Gajah Mada, Denpasar yang sudah menetapkan dua tersangka yaitu Alit Widhiadnyana (Direktur PT Alit Wirajaya) dan Ngurah Kosala Cakrawathi (Direktur CV Unika Desain) akhirnya masuk tahap P-19.

Kasi Pidsus Kejari Denpasar, Wayan Sutarjana, mengatakan saat ini pihaknya sudah mengembalikan berkas perkara ke penyidik Polresta Denpasar (P-19). Dalam berkas yang dikembalikan, penyidik menyertakan beberapa petunjuk. Diantaranya berkas kedua tersangka yang dipisahkan. "Awalnya satu berkas. Tapi dalam petunjuk P-19 sudah kami minta supaya dipisahkan antara tersangka Alit dan Ngurah Kosala," jelasnya pada Jumat (24/4).

Informasi yang dihimpun, dalam berkas P-19 yang dikirimkan memuat beberapa petunjuk tambahan. Diantaranya meminta penyidik menyertakan pendapat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Pendapat LKPP diperlukan untuk menentukan alur dari pemegang kebijakan dalam proyek tersebut. "Sampai saat ini tersangka hanya dari pihak rekanan. Nah, dari LKPP ini nantinya bisa menyeret keterlibatan pihak Pemkot Denpasar yang memiliki kebijakan dalam proyek tersebut. Apalagi penyidik sempat sudah menetapkan tersangka dari staf Pemkot Denpasar, tapi sampai sekarang tidak pernah dikirimkan berkasnya," beber sumber.

Selain saksi LKPP yang belum disertakan dalam berkas penyidik, saksi ahli dari Unud yang mengungkap tentang volume yang berkurang, juga belum lengkap. Jaksa memberikan petunjuk, harus dimintakan juga kajian mengenai penyusutan volume yang terjadi dalam pengerjaan paving tersebut. "Harus ada hitungan jelas tentang penyusutannya," lanjut sumber.

Sementara itu, informasi di kejaksan juga menyebutkan, penyidik Polresta Denpasar juga disebutkan sempat mengadakan penyelidikan tentang dugaan penyelewengan percetakan karcis di salah satu perusahaan daerah milik Pemkot Denpasar. "Sampai saat ini, kami belum terima SPDP nya," kata sumber tersebut. **rez**

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 5



Dugaan Penyimpangan di PDAM Karangasem Penyidik Temukan Perbuatan Melawan Hukum

DENPASAR, NusaBali

Laporan masyarakat terkait penyimpangan yang terjadi di PDAM Karangasem terus didalami penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Informasi terakhir, penyidik sudah menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan pada Jumat (24/4).

Ia mengatakan setelah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat PDAM Karangasem serta saksi lainnya dan mempelajari bukti lainnya, penyidik memastikan sudah mendapat perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. "Sudah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum," jelas Ashari.

Namun ia enggan berkomentar lebih lanjut termasuk menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum yang dimaksud. Hal yang sama juga dikatakan saat ditanya soal calon tersangka dalam kasus yang sudah diselidiki sejak sebulan lalu. "Saya ha-



• NET

Ashari Kurniawan

nya bisa memberikan informasi itu saja," beber pria asal Jawa Tengah ini.

Dalam kasus ini, beberapa pejabat PDAM Karangasem termasuk Dirut, Baktiyasa sudah diperiksa di Kejati Bali terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan air minum di Karangasem ini. Tidak hanya itu, penyidik juga sudah beberapa kali turun ke PDAM Karangasem untuk melakukan pemeriksaan langsung. Diantaranya dalam pengadaan pipa, pompa air dan beberapa penyimpangan lainnya yang dilaporkan masyarakat. rez

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 5



Ketua BPK Apresiasi Respons Cepat Tabanan



• NUSABALI/SUGIANTO

Bupati Putu Eka Wiryastuti didampingi Wabup IKG Sanjaya, dan Ketua Dewan Ketut Suryadi saat terima Ketua BPK RI Harry Azhar Azis di Tabanan, Jumat (24/4).

TABANAN, NusaBali
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr H Harry Azhar Azis MA, mengapresiasi respons cepat Pemkab Tabanan. BPK salut atas prestasi Pemkab Tabanan, yang sempat mendapat opini disclaimer dari atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2012, namun setahun berikutnya berhasil 'naik kelas' hingga raih Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Apresiasi tersebut disampaikan langsung Harry Azhar Azis saat acara sosialisasi 'Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan' di Kantor Bupati Tabanan, Jumat (24/4). Harry Azhar Azis didampingi anggota BPK VI (mewilayahi Indonesia Timur) Prof Dr Barullah Akbar MBA CMPM dan Ketua

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Sambungan

Ketua BPK Apresiasi Respons Cepat Tabanan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

BPK Perwakilan Bali, Arman Syifa. Kegiatan tersebut dihadiri pula Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti yang didampingi Wakil Bupati I Komang Gede (IKG) Sanjaya, Sekkab Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan Pimpinan SKPD lingkup Pemkab Tabanan.

Menurut Harry Azhar Azis, respons Pemkab Tabanan terhadap rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam beberapa tahun terakhir terbilang menarik. Ini semua karena respons yang diberikan terhadap rekomendasi BPK sangat cepat.

Bahkan, kata Harry Azis, tingkat respons Pemkab Tabanan tembus angka 92,76 persen dari sekitar 700 lebih total item yang direkomendasikan BPK untuk dibenahi. "Dari permintaan kita untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP), Pemkab Tabanan tergolong sangat cepat," tegas Harry Azis.

Kendati demikian, Harry Azis mengakui masih ada beberapa persoalan di Tabanan yang selalu masuk sebagai temuan BPK setiap tahun. Misalnya, persoalan aset serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

kewenangan pemungutannya telah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Harry Azis, khusus untuk aset, persoalan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Di antaranya, faktor perpindahan aset dan pengelolaan dari sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah yang kurang teliti. Hal inilah yang patut mendapatkan perhatian lebih.

"Karena itu, kita minta ke pemerintah daerah untuk proaktif berkonsultasi kepada Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apalagi, sudah ada instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada BPKP untuk terus membina pemerintah daerah yang masih bermasalah," beber Harry Azis.

Sedangkan untuk persoalan piutang PBB, Harry Azis mengaku sempat menyampaikan persoalan ini kepada Presiden secara langsung. Sebab, persoalan piutang PBB ini tidak sepenuhnya berada di daerah, mengingat kewenangan untuk memungut sebelumnya dipegang oleh Direktorat Pajak.

Karena itu, kata Harry Azis, sampai sejauh ini koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masih terus dilakukan. Termasuk,

mengkai apakah tetap memasukkan piutang PBB ke dalam pemeriksaan atau dikeluarkan.

"Jadi, apakah nantinya perlu Peraturan Menkeu yang baru atau tidak? Tapi, kalau toh ada aturan baru, bukan berarti masalahnya selesai begitu saja. Tetap masuk dalam pemeriksaan, namun diselesaikan dengan cara tersendiri. Apakah (piutang) itu tidak masuk neraca keuangan daerah atau yang lainnya?"

Sementara itu, Bupati Putu Eka Wiryastuti sangat berterima kasih atas kedatangan Ketua BPK, Harry Azis, beserta jajarannya ke Tabanan. Masalahnya, selama ini Tabanan sama sekali tidak pernah dikunjungi langsung oleh pimpinan BPK. "Sepanjang sejarah, ini yang pertama kalinya. Tentu saya sangat berterima kasih," ujar Bupati Eka Wiryastuti dalam pertemuan sosialisasi tersebut.

Menurut Eka Wiryastuti, pengarahan dari BPK merupakan hal penting. Sebab, ini bisa menjadi motivasi tersendiri untuk membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Eka Wiryastuti pun berharap momen ini dimanfaatkan dengan baik oleh jajaran Pemkab Tabanan, agar ke depan mampu menciptakan pertanggungjawaban keuangan

pemerintah yang lebih baik. "Apalagi, aturan-aturan dari pusat banyak yang sering berubah, sehingga di daerah harus bisa menyesuaikan dan mengubah sistem kerja," tegas Bupati Wanita Pertama di Bali ini.

Pemkab Tabanan sendiri sebelumnya sempat mendapat rapor 'merah' karena diberi opini disclaimer dari BPK atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2012. Setahun berikutnya, Pemkab Tabanan berhasil 'naik kelas' meraih opini WDP atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2013.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tabanan Tahun Anggaran 2013 yang menghasilkan opini WDP tersebut telah diarahkan BPK Perwakilan Bali kepada Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, 11 Juni 2014 lalu.

Pemkab Tabanan pun kini setara dengan daerah lainnya di Bali, seperti Jembrana dan Klungkung, yang juga mendapat opini WDP dari BPK. Namun, Pemkab Tabanan harus berjuang keras ke depan agar bisa meraih predikat tertinggi Wajar Tanpa pengecualian (WTP), sebagaimana yang telah dibukukan Pemkot Denpasar dan Pemprov Bali, selain pernah ditorehkan Pemkab Badung. @ k21

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 15



Sekolah Bingung Format Laporan BOS

Ada perubahan format laporan penggunaan dana BOS. Banyak sekolah yang bingung tata cara penyusunan laporan penggunaan dan pengembalian kelebihan dana tersebut.

DENPASAR, NusaBali

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar (Kabid Dikmen Disdikpora Denpasar) Wayan Supartha mengakui bahwa format penyusunan laporan dana bantuan operasional sekolah (BOS) masih membingungkan pihak sekolah.

"Sejak Rabu kemarin, kami sudah ingatkan sekolah-sekolah untuk segera menyeter laporan penggunaan dana BOS. Waktu itu masih ada lima sekolah yang belum menyeter," jelas Supartha, Jumat (24/4).

Keterlambatan lima sekolah tersebut, menurutnya, diberi permakluman karena adanya perubahan format penyelesaian laporan. "Memang ada format baru penyusunan laporan. Kami sudah koordinasikan itu. Tinggal satu sekolah yang belum," jelasnya.

Supaya tidak menghambat pelaporan ke BPK, pihaknya mengaku terus mengejar pihak

sekolah untuk menyelesaikan laporan. "Akhirnya sudah diseter, sehingga semua SMA/SMK sudah klop laporan penggunaan dana BOS-nya," jelasnya.

Ke depan Supartha berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi sekolah agar secara reguler menyusun laporan tersebut. Dikatakannya, laporan penggunaan dana BOS tersebut nantinya akan diaudit oleh BPK. Supartha pun kembali mengingatkan agar pihak sekolah menyusun laporan dengan baik dan benar agar penggunaan dana sesuai dengan yang dilaporkan. Apalagi mengingat sekolah saat ini banyak mendapat kucuran dana baik dari APBN maupun APBD. "Maka harus hati-hati memanfaatkan dana. Ikuti petunjuk teknis yang diberikan agar tidak menemukan masalah," tegasnya.

Di sisi lain, perencanaan anggaran juga harus cermat agar dana yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pun ada dana lebih, harus dikembalikan. "Kadang-kadang ada dana BOS yang tidak habis pakai. Itu agar segera dikembalikan. Kami tidak bisa pungkiri kalau sampai sekarang kadang ada sekolah yang bingung bagaimana mengembalikannya," katanya.

Dana BOS diberikan bervariasi tiap sekolah tergantung jumlah siswa. Per siswa tingkat SMA/SMK diberikan Rp 1,2 juta dalam setahun. Pemanfaatan dana tersebut dibagi dalam 16 item, antara lain peningkatan pengembangan kompetensi guru dan pemeliharaan alat. **n**



Winasa Masih Istirahat di RS



• DOK NUSABALI

I Gede Winasa

NEGARA, NusaBali

Mantan Bupati Jembrana dua periode, I Gede Winasa masih butuh istirahat dan perawatan di RSUD Negara. Meski kondisinya membaik, namun mantan *sang mawerat* (pengusaha) yang terbelit kasus dugaan korupsi pengadaan mesin kompos ini belum dikembalikan ke Lembaga Permas-yarakatan (Lapas) Negara.

Direktur RSUD Negara, dr Made Dwipayana menjelaskan, kondisi kesehatan Gede Winasa sudah membaik. "Namun kami belum memberikan izin untuk keluar dari sini (RS) karena dikhawatirkan kondisinya memburuk lagi," kata Dwipayana, Jumat (24/4). Ia mengungkapkan bahwa tekanan darah Winasa sangat tinggi saat dibawa dari Lapas menuju RSUD Negara untuk yang pertama kalinya pada Rabu (22/4) malam. Namun kini sudah mulai stabil. Demikian pula dengan sakit di kepalanya mulai berkurang.

Menurut dia, dari observasi dan pemeriksaan medis dike-

tahui bahwa mantan bupati dua periode yang banyak mendapatkan penghargaan tingkat nasional tersebut terkena serangan vertigo. "Penyakit pada kepala itu bisa karena yang bersangkutan kelelahan, kurang tidur, dan terlalu banyak berpikir," ujarnya. Mengenai diperbolehkannya Winasa meninggalkan rumah sakit, Dwipayana mengaku masih terus memantau dalam dua hari ke depan.

Winasa dibawa kembali ke rumah sakit, Kamis (23/4) pagi, setelah mengeluhkan penyakitnya kambuh sejak Rabu (22/4) malam yang disertai dengan muntah-muntah. Kepala Sub-Seksi Pelayanan Tahanan Lapas Negara I Nyoman Tulus mengungkapkan bahwa pada Rabu (22/4) malam Winasa sempat dibawa ke Instalasi Rawat Darurat RSU Negara dan diperbolehkan kembali ke Lapas. "Ternyata kondisinya tidak membaik sehingga Kamis (23/4) pagi kembali kami bawa ke rumah sakit. Karena dari observasi dokter dia butuh rawat inap. Makanya kami berikan izin," katanya.

Winasa saat ini menjalani hukuman penjara untuk kasus korupsi pengadaan mesin pabrik kompos yang juga menyeret beberapa pejabat Pemkab Jembrana lainnya. Selain menjalani hukuman dengan vonis 2,5 tahun, dia juga masih terjerat kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas dan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Jembrana (Stitna). **ant**

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 7